

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI KEPEMUDAAN
DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

SKRIPSI
*Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Fakultas Syari'ah*



M. GHAZALI AKBAR

SIP 130064

PEMBIMBING

SITI MARLINA. S.Ag., M. HI

Dr. DEDEK KUSNADI, S.Sos., MSI

PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULYHAN THAHA SYAIFUDDIN JAMBI

1441/2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama M. Ghazali Akbar
NIM SIP 130064
Jurusa Ilmu Pemerintahan
Alamat Jln Jambi-Palembang Km 17, Desa Muaro Sebao.

Menyatakan dengan sesungguhnya ,bahwas kripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.”** Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisimateri yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Oktober 2019

Yang menyatakan,



Ghazali Akbar

NIM.SIP 130064

Pembimbing I
Pembimbing II
Alamat

: Siti Marlina, S.Ag., MHI
: Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., MSI
: Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-MA. Bulian KM.16 SIMP. Sungai Duren.
Jaluko Kab. Muaro Jambi (31346) Telp. (0741) (582021)

Jambi, Oktober 2019

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi M. Ghazali Akbar yang berjudul "**Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Siti Marlina, S.Ag., MHI
NIP. 19750221 200701 2 015

Pembimbing II



Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.SI
NIP. 19811107 201101 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren Kab. Muaro Jambi 36363 Telp (0741) 582021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B. /D.II/PP. / /2019

Tugas dengan judul "Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi"

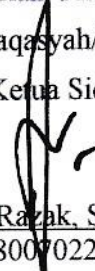
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Ghazali Akbar
NIM : SIP.130064
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 14 November 2019
Nilai Munaqasyah : 80,34 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji:


Ketua Sidang


Abdul Razak, S.H.I, M.IS
NIP.198007022009011007


Penguji I


Muatiah RH, S.Ag, M.Sy
NIP.197007061998032003

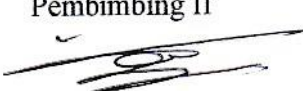
Penguji II


Yudi Armansyah, S.Th.I, M.Hum
NIP.19860606201503107

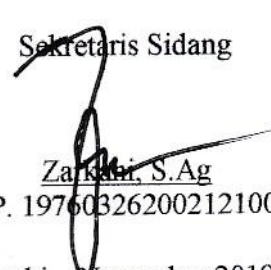
Pembimbing I


Siti Marlina, S.Ag, M.H.I
NIP.197502212007012015

Pembimbing II


Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos, M.SI
NIP.198111072011011005

Sekretaris Sidang


Zarkati, S.Ag
NIP. 197603262002121001

Jambi, 14 November 2019
Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan




Dr. Miftah, M.Ag
NIP.131251996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat hidyah-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta teruntuk :

- ❖ *Orang Tuaku yang tercinta Bapak Mangun Muhir dan ibu Yuliana terimakasih telah memberikan Do'a dan perjuangannya.*
- ❖ *Ayahanda Usman (Alm) inilah persembahan tertinggi yang dapat saya berikan kepada Ayahanda, Terima kasih atas bimbingan Ayahanda selama masa hidup.*
- ❖ *Adik-adik tercinta Muhammad Isaldi dan M. Zakwan Syarof, terimakasih telah memberi do'a dan semangat.*
- ❖ *Keluarga besar di jambi, terutama Nenek Fatimah beserta terimakasih telah memberikan Do'a serta Dukungannya.*
- ❖ *Teruntuk kamu Azmi Wulandari terimakasih untuk dua tahun ini telah memberikan semangat*
- ❖ *Kepada teman-teman terdekat dalam ruang lingkup "IMMJ" biarlah ini semua menjadi kenangan untuk bisa di abadikan dan di ceritakan di masa depan nanti*
- ❖ *Sege nap keluarga besarku tercinta.*

MOTTO

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
قَلِيلًا



Artinya:

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan lalu mereka menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Pemerintah di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Pemerintah). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syetan, kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu). (Q.S Annisa : 83,)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemerintahan kabupaten Muaro Jambi dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi yaitu dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda (DISPARPORA), dalam pembinaan dan pengembangan pemuda khususnya Komite Pemuda Nasional Indonesia Muaro Jambi (KNPI), Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi (IMMJ), dan Satuan Pelajar, Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA-PP) Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini Disparpora melakukan tugas dan fungsinya serta perannya berupa mengisi pengetahuan (keilmuan) atau mengisi materi, membuat lomba Bujang Gadis Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan focus penelitian: (1) Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Membina dan Mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi (2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Membina dan Mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian ini ialah bahwa pemerintah belum maksimal dalam pengembangan dan pembinaan Organisasi Kepemudaan di Muaro Jambi Hanya berupa mengisi materi dan dating diacara tersebut, yang menjadi kendala peran pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Disparpora adalah kurangnya pengetahuan tentang tugas dan fungsi Disparpora, Kekurangan Anggaran dalam mengadakan kegiatan serta simpang siur tentang program kerja dengan instansi lain.

Kata Kunci :Pemerintah, Pemuda, PembinaanPengembangan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas petunjuk dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi “.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik materi maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Disini penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA. Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan izin kepada penulis dalam membuat skripsi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, M.HI, Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag, M.HI selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag, M.HI selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi, yang telah memberikan izin kepada penulis dalam membuat skripsi.
4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.Sy dan Ibu Tri Endah Karya. L, S.IP, M.IP selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberi masukan kepada penulis dalam membuat skripsi.
5. Ibu Siti Marlina, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I yang dalam kesibukannya selalu memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan dan saran-saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

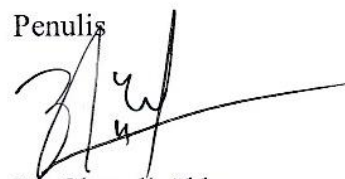
6. Bapak Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.SI selaku pembimbing II yang dalam kesibukannya selalu memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar beserta staf Fakultas Syari'ah yang telah banyak dalam memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk skripsi ini.
8. Kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi yang bersedia menerima peneliti untuk menjadikan Dinas tersebut sebagai tempat penelitian dan Seluruh Responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulisan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun serta dapat memberikan perubahan kearah yang lebih positif dalam proses pembelajaran dimasa yang akan datang dan sangat penulis harapkan sekali. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Amin ya rabbal'alamin.

Jambi, Oktober 2019

Penulis



M. Ghazali Akbar

SIP.130064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. KerangkaTeori.....	7
H. Tinjauan Pustaka.....	32
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Sumber Data.....	40
F. Unit Analisis	41
G. Metode Pengumpulan Data.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

H .Teknik Analisis Data.....	43
I. Sistematika Penulisan	43
J. Jadwal Penelitian.....	46
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geogrfis Kabupaten Muaro Jambi	47
B. Sosial Demogrfi Kabupaten Muaro Jambi	49
C.Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi	52
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENEL ITIAN	
A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Membina dan Mengebangkan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Muaro Jambi.....	56
B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten MuaroJambi.....	59
C. Upaya Pemerintahan Dalam Pembinaan dan Pengembangan PemudaMuaroJambi.....	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 2.1 Informan	40
Tabel 2.2 Jadwal Penelitian.....	46
Tabel 3.1 Peta Kabupaten Muaro Jambi.....	49
Tabel 3.2 Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi	50
Tabel 3.3 Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabuapten Muaro Jambi.....	51
Tabel 3.4 Jumlah penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabuapten Muaro Jambi	51
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk miskin per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi.....	5
Tabel 3.6 Perkembangan tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 3.7 Perkembangan jumlah penduduk miskin di kabupaten Muaro Jambi.....	54
Tabel 3.8 Perkembangan PDRB Kabupaten Muaro Jambi.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
UWGM	Universitas Widyagama Mahakam
DISPARPORA	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
SAPMA-PP	Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila
IMMJ	Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Nama Informan
Lampiran 2	Riwayat Hidup
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Kartu Bimbingan
Lampiran 5	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Generasi muda pada semua zaman dan tempat memegang peranan yang signifikan. Tak heran apabila kemudian generasi muda menjadi pilar dari kokohnya sebuah Negara. Dinamika yang ada memberikan gambaran bahwa generasi muda memberikan kontribusi yang besar terkait dengan perubahan dan proses pembangunan yang ada. Sejak era Pergerakan Nasional hingga Orde Reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus memastikan bahwa proses perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa.

Dr. Fuad Hasan dalam suatu penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar waktu kaum remaja digunakan untuk kegiatan-kegiatan santai. Dan seraya membandingkan dengan apa yang ada di luar negeri, khususnya negara-negara maju, diperoleh kesan bahwa justru sebagian besar waktu remaja digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif.¹

Ia Mengatakan bahwa para remaja kita umumnya masih lebih banyak bersantai, dari pada berproduksi adalah sama dengan mengatakan bahwa mereka menempuh sikap hidup *easy going*, yang kita terjemahkan saja dengan kata-kata hidup seenaknya.

Pertautan hidup seenaknya ialah dengan semangat mencari kenikmatan kenikmatan jangka pendek (*pleasure seeking*), karena tidak sanggup menghayati

¹ Budhy Munawar-Rachman, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Cet- 1 (Jakarta Selatan : Nurcholish Madjid Society (Ncms)). Hlm.1259

kebahagiaan yang lebih bersifat jangka panjang. Apa yang dapat dicapai sekarang hendak dinikmati sekarang juga, tanpa kesabaran untuk menundanya sampai saat yang akan datang yang lebih tepat. Padahal, menurut para sarjana, kenikmatan yang sesungguhnya ialah kenikmatan yang tertunda (deferred enjoyment), yaitu yang terwujud setelah pengingkaran kenikmatan itu karena bekerja keras. Dan menurut para ahli psikologi, kematangan emosional seseorang dan kedewasaannya juga dapat diukur dari mampu tidaknya seseorang meninggalkan orientasi jangka pendek dan memegang orientasi jangka panjang.²

Hal itu dapat dengan jelas dan mudah dibuktikan dengan mengamati jiwa kanak-kanak dan jiwa orang dewasa. Maka kalau benar bahwa sebagian besar angkatan muda kita berkebudayaan santai, tentulah ada sangkut pautnya dengan proses pematangan kejiwaan bangsa kita secara keseluruhan. Mungkin sekali penemuan bangsa kita sebagai bangsa muda secara tidak langsung dan tidak disadari menggambarkan tingkat proses kematangan jiwa bangsa tersebut. Sebagai bangsa muda kita belum “dewasa”, dan karena itu jiwa bangsa kita belum matang.

Ketidak matangan itu secara menonjol tercermin pada pola hidup para remaja kita: easy going, pleasure seeking, relaxed, dan seterusnya. Secara tidak langsung penilaian serupa juga diberikan oleh seorang ahli ekonomi terkemuka dan pemegang hadiah Nobel, Gunnar Myrdal. Dalam sebuah karyanya, dia mengatakan bahwa beberapa negara berkembang, salah satunya ialah Indonesia, tergolong ke dalam kategori negara lunak (soft state). Kelunakan itu terutama sebagaimana dibuktikan oleh sikap kurang tegas, tak menentu dan tak konsisten,

² Budhy Munawar-Rachman, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Cet- 1 (Jakarta Selatan : Nurcholish Madjid Society (Ncms)). Hlm.160

terhadap pelanggar-pelanggar hukum, khususnya yang dilakukan oleh para pembesar dan pejabat sendiri yang menyalahgunakan wewenangnya atau melakukan tindak korupsi. Jika Myrdal benar maka hampir dapat dipastikan bahwa sikap-sikap easy going kaum remaja kita yang merisaukan.³

Dalam Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia No 31 Tahun 2016 tentang hasil pemetaan urusan pemerintah daerah dibidang kepemudaan dan keolahragaan bahwa rendahnya tingkat beban kerja pemerintah daerah terhadap pemuda dan olah raga di Kabupaten Muaro Jambi yaitu hanya berjumlah 352 dengan tingkat intensitas sangat kecil.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut harus ada upaya untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembangunan, untuk itu pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Keterlibatan ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan akan cenderung memberikan potens negatif dan akan menjadi faktor penghambat pembangunan.⁵

Untuk itu pemerintah wajib memfasilitasi kaum muda supaya hidupnya bisa terarah, berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan pemuda, demi terwujudnya bibit bangsa yang berkualitas dan ideal, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan bahwa:

“Pasal 9 dan 13 ditegaskan bahwa: pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya

³ Suyanto, *Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda* , E-Journal Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Uwgm Samarinda Vol.7 No.1juni, 2018.

⁴ Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia No 31 Tahun 2016

⁵ Budhy Munawar-Rachman, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Cet- 1 (Jakarta Selatan : Nurcholish Madjid Society (Ncms)). Hlm. 1261



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemberdayaan. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela Negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspres, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”⁶

Sementara itu dalam UU Nomor 40 tahun 2009 pasal 45 ayat 1 dan 2 yakni:

“(1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan, (2) satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya”.⁷

Memahami pentingnya organisasi kepemudaan serta pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspora dalam memberdayakan organisasi kepemudaan, maka keinginan penulis untuk mengidentifikasii lebih jauh mengenai masalah pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi dengan mengangkat judul penelitian **”Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan di teliti , maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Membina Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Muaro Jambi ?

⁶ UU Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 9 dan 13

⁷ Uu Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 40



2. Kendala apa saja yang ditemukan dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan di sekitar hal-hal yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2017-2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan peran pemerintah dalam pembinaan organisasi kepemudaan di kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.
3. Mengetahui upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.

E. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan-tujuan penelitian tersebut tercapai, maka penelitian ini akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berbagai kajian literatur mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak bagi kepastakaan ilmu pemerintahan dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang ” Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi, agar terwujudnya regenerasi bangsa yang baik sebagai salah satu pembawa peradaban kemajuan Negara dimasa yang akan datang.
3. Sebagai kelengkapan persyaratan bagi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada fakultas Syariah jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil karya tulis ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman tentang Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.

Manfaat secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum, mahasiswa dan pemuda sebagai tinjauan praktis dalam implementasi dan menambah wawasan tentang Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga pemuda diharapkan menjadi regenerasi yang baik dalam pembangunan Negara kedepan.

G. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu: *Pertama* Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. *Kedua* Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, *Ketiga* Kedudukan orang-orang dalam perilaku, *Keempat* Kaitan antara orang dan perilaku.⁸

Teori peran Adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. posisi seorang actor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁹

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 216

⁹ *Ibid*, Hlm.215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance).¹⁰

2. Perilaku dalam peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :

a) Harapan tentang peran (expectation)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.¹¹

b) Norma(norm)

Secord dan Backman berpendapat bahwa , norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.

¹⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

¹¹*Ibid* , Hal. 4

2. Harapan normatif (role expectation) ,yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi kedalam dua jenis: Harapan yang terselubung (convert) , yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan-
 - Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini di namai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.
 - c). Wujud perilaku dalam peran (performance).

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.¹²

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu

¹²Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara- caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya. Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
 2. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku- perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).¹³
- d). Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang

¹³ *Ibid*, Hal. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.¹⁴

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan- harapan dan norma- norma masyarakat.

Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut. Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (overt), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (covert). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.¹⁵

¹⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 6

¹⁵ *Ibid.* Hal. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Merton dan Kitt mengemukakan bahwa, setiap orang memerlukan kelompok rujukan (reference group) tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Dan fungsi kelompok rujukan tersebut ada dua macam, yaitu : *Pertama*, Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/kepercayaan anggotanya. Terlepas dari benar- salahnya standar itu, kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu-individu sehingga mau-tidak-mau individu mengikuti standar tersebut. Jika norma- norma itu diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan.

Kedua, Fungsi komparatif (perbandingan), dalam fungsi ini kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu, untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah (untuk mengecek kebenaran objektif). Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak. Dalam hal yang terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan normatif.¹⁶

3. Konsep Pemerintahan

Sebagaimana kita pahami lewat studi ilmu politik, gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan secara etimologis istilah government (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya

¹⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 8

merupakan jantung dari studi ilmu politik (Kuper, 2000: 418). Untuk pengenalan awal kita akan memahami pemerintahan secara etimologis beserta konotasi yang terkandung di dalamnya sehingga kita dapat dengan mudah memahami pengertian sederhana dimaksud lewat studi di atas.¹⁷

Istilah pemerintah menurut Finer dalam Kuper setidaknya menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu *pertama*, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah.¹⁸

Bahkan, keadaan yang mencekam bagi keamanan setiap individu merupakan indikasi tentang hadir tidaknya sebuah pemerintahan (Thomas Hobbes dalam Rasyid, 1999; 3). Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum (Social order), Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), serta terbukanya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya. Sedangkan ketertiban adalah situasi dan kondisi

¹⁷ Muhadam Lobollo, *Memahami Pemerintahan*, Cet -7, (Jakarta: Raja Grafindo), Hlm.17

¹⁸ *Ibid*, Hlm.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan pada hukum, norma serta konsensus umum.

Kedua, istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. Sebagai contoh, kita dapat menyebut suatu pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah nasional biasanya kita sebut sebagai pemerintah pusat sekaligus ibukota negara, sedangkan pemerintah subnasional kita sebut sebagai pemerintah daerah yang berada dalam yuridiksi pemerintah nasional. Selain eksistensi dimaksud, istilah ini juga menunjukkan institusi, lembaga maupun organisasi pelaksana dalam proses pemerintahan.

Pada level operasional, kita sering mengidentikkan lembaga seperti departemen, dinas, badan maupun kantor sebagai representasi pemerintah. *Ketiga*, pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Dalam kenyataannya kita sering menyebut Pemerintah Barack Obama atau Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Semua jabatan-jabatan pemerintah yang diisi oleh orang yang dipilih (public elected system) maupun diangkat (political appointed) oleh pemerintah menguatkan secara langsung istilah pemerintah itu sendiri.¹⁹

Keempat, istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan

¹⁹Muhammad Lobollo, *Memahami Pemerintahan* Cet -7 (Jakarta:Raja Grafindo), Hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Sistem pemerintahan menggambarkan keseluruhan interaksi pemerintah yang saling berkaitan dan tergantung dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem pemerintah pada akhirnya mendorong terbentuknya klasifikasi untuk membedakan cara-cara pemerintah melakukan interaksi di antara cabangcabang kekuasaan. Dalam perkembangan dewasa ini system 18 pemerintahan membedakan diri pada sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, serta sistem pemerintahan campuran (mixed systefi).

Namun demikian, dua sistem pemerintahan sebelumnya jauh lebih dikenal sekalipun tak kurang memiliki kelemahan hingga terbentuknya sistem terakhir. Inggris misalnya merupakan contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sementara Amerika menggunakan sistem pemerintahan presidensial di samping itu juga menerapkan sistem campuran, Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintah oleh Finer menyisakan satu pengerdan yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya (dalam Kuper, 2000: 419) relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejauh mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap rvarga negara bagi upaya mencapai tujuan, Dalam fenomena yang lazim sebagian pemerintah yang menganut paham demokasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokatis biasanya menlandarkan dirinya sebagai pelayan bagi masyarakatnya.²⁰

²⁰ Muhadam Lobollo, *Memahami Pemerintahan*, Cet -7 (Jakarta:Raja Grapindo), Hlm.8-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebaliknya, pemerintah totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyandarkan diri sebagai majikan bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima baik karena kondisi masyarakat maupun konsensus dari pemerintah masing-masing yang diruangkan dalam cita konsdusif.

Di Indonesia, pengertian ini telah dikembangkan secara sistematis oleh Ndraha (1999) dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun terakhir dengan istilah ilmu pemerintahan baru (kybernologi). Sekalipun konsep ini kerap menuai polemik dari aspek formal dan material ilmu pengetahuan, namun sejauh ini tak ada konsep lain yang lebih menguatkan dari apa yang telah digagas oleh Finer, kecuali keluh kesah para pemerhati pemerintahan di berbagai jurnal ilmu sosial. Tanpa membaca lebih dekat apa yang menjadi pikiran Ndraha dalam buku kybnno[og filid 1-9) tentu agak sulit memahami jika hanya sebatas penilaian dua atau tiga paper singkat.²¹

Bahkan mereka yang hanya mampir untuk menyelesaikan program setingkat magister dan doktoral seringkali menemui jalan buntu untuk memahami latar, kerangka, matriks hingga konsep dimaksud. Apakah ini merupakan suatu kemunduran ataukah kemajuan dari aspek pengembangan ilmu pemerintahan tentulah bergantung dari sejumlah faktor, dimana salah satunya adalah seberapa besar akseptabilitas para pembelajar di bidang studi pemerintahan memahami dan menelaah konsep dan teori lebih mendalam hingga ke tingkat praktik untuk membiasakan dan mengidentifikasi secara jelas perbedaan antara ilmu

²¹ Muhadam Lobollo, *Memahami Pemerintahan* Cet -7 (Jakarta:Raja Grapindo), Hlm. 19-20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintahan dan ilmu pengetahuan lain. Perdebatan kusir ranpa argumentasi yang memadai tentu saja hanya akan melahirkan arogansi keilmuan masing-masing. Mungkin lebih tepat jika duduk bersama lalu mencoba mengkonstruksinya dengan bijak sebagai landasan dalam pengajaran mata kuliah wajib di jurusan pemerintahan.

Paradigma baru ilmu pemerintahan dibangun dengan mendasarkan diri pada kultur kekuasaan, ekonomi, dan sosial sebagai suatu rangkaian skematis yang saling mengikat dan tergantung. Iftrltur kekuasaan mendorong pemerintah mendesain dirinya menjadi sebaik mungkin sebagai pemerintah (good government) dalam konteks memproduksi regulasi, melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan memaksimalkan pelayanan, baik pelayanan umum (public good) maupun pelayanan yang bersifat privacy. Kultur ekonomi mendorong pemerintah berkewajiban memberikan keleluasaan pada kelompok penyandang dana (kapitalis) memposisikan dirinya sebagai kelompok yang berkewajiban memberdayakan masyarakat melalui modal yang dikuasai. Sedangkan kultur sosial sebagai subjek dan objek ;,ang dilayani mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan hak pada ralqrat untuk mengawasi proses pemerintahan, sebab di sana.lah kedaulatan dipandang bermula. Secara filosofis, Ndraha (1999:5) menegaskan bahwa keseluruhan gejala pemerintahan berawal dari Tuhan dan berakhir pada manusia sebagai objek dan subjek yang melayani.²²

²² *Ibid*, Hlm. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jika dihubungkan dengan agama, gejala ini mengingatkan kita tentang makna spiritual ibadah shalat bagi kaum Muslimin yang memulai gerakan shalatnya dengan pengakuan kebesaran Tuhan (Allah Akbar) dan diakhiri dengan keselamatan bagi lingkungan sekitarnya (Assalamwalaikum Warahmatullohi Wabar aketuh). Suatu gerakan yang menggambarkan filosofi kehidupan manusia dalam relasi vertikal dan horizontal. Sebagai representasi rakyat, pemerintah merupakan entitas yang dipandang berdaulat secara konkret. Rakyat memang memiliki kedaulatan awal, namun lewat proses politik kedaulatan mereka berpindah dan dijalankan secara konkret oleh pemerintah yang dipilihnya. Asumsi ini disusun untuk membedakan bahwa tidak semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi sebagaimana organisasi pemerintah dapat disebut sebagai entitas pemerintah yang berdaulat. Sebagai contoh, setiap lembaga serikat seperti asosiasi pemerintah kabupaten/ kota, asosiasi pemerintah provinsi, asosiasi pemerintah desa, asosiasi dewan, pengurus olahraga atau pengurus rumah ibadah sekalipun memiliki sistem secara formal dan mampu membuai keputusan yang bersifat mengikat secara internal tidaklah dapat disebut sebagai pemerintah, sebab organisasi pemerintah jauh lebih kompleks dibanding asosiasi lain.²³

Pada dasarnya, pemerintah boleh jadi ada tanpa negara, dengan kata lain pemerintah hadir mendahului negara sebab pemerintah hanyalah salah satu unsur yang mengkonstruksi negara secara abstraktif. Nyatanya, secara antropologis, problem sosial selama ini dapat diselesaikan lewat sistem sosial tanpa mengikutsertakan kekuatan pemaksa yang melekat pada negara. Bahkan, dalam

²³ *Ibid*, Hlm. 21-22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

banyak kasus di tengah-tengah masyarakat tradisional hingga modern sekalipun, konflik politik seringkali dapat diselesaikan melalui cara-cara lokal penuh adab. Inilah yang kita sebut sebagai upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal (indigenous local).

Tercerabutnya akar-akar sosial sebagai sumber daya lokal dalam konteks tersebut, pada kenyataannya lebih banyak disebabkan oleh tingginya intervensi negara melalui regulasi yang didesain hingga menyusutkan otonomi asli masyarakat. Padahal, entitas sosial budaya yang lambat laun beradaptasi membentuk sistem hukum tersendiri justru mendahului kelahiran entitas pemerintah secara luas sekelas negara.²⁴

Dalam sistem pemerintahan yang lebih maju, pemerintah yang berdaulat ditandai oleh pemisahan tugas oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Badan eksekutif memainkan peranan penting dan secara umum dominan dalam mengimplementasikan peraturan pada masyarakat. Badan legislatif bertugas memproduksi peraturan sebagai landasan formal yang mengikat secara keseluruhan. Sedangkan badan yudikatif bertanggung jawab untuk menjaga, menafsirkan, serta mengawal jalannya peraturan berdasarkan kasus yang diterapkan.

Kini marilah kita melihat pengertian pemerintahan dan sejumlahnya nilai penting yang terkandung di dalamnya. Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam

²⁴ Muhadam Lobollo, *Memahami Pemerintahan* Cet -7 (Jakarta:Raja Grafindo),Hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara pemilik suara (roters) maupun para pekerja (worlers). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Robinson (dalam Kuper, 2000: 417), pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum.

Dalam konteks itu, menurutnya setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahnya.²⁵

Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya sena seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar

²⁵ *Ibid*, Hlm. 22

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi.

Fenomena pemerintahan dewasa ini telah meluas tidak saja pada dunia pemerintah semata, tetapi juga pada ruang ncn pemerintah seperti perusahaan. Upaya-upaya dalam rangka penerapan kekuasaan melalui serangkaian mekanisme untuk menjamin akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi pada berbagai sektor di luar pemerintah menunjukkan gejala pemerintahan yang semakin menguar. Setidaknya hal ini terlihat dalam pembentukan serangkaian aturan atau struktur otoritas dalam komunitas tertentu yang memainkan peran atau fungsi pengelolaan sumber daya termasuk dalam menjaga taanan sosial. Meluasnya upaya untuk menata pemerintahan ke arah yang lebih baik mendorong donor intemasional untuk mengembangkan konsep good gotemance (pemerintahan yang baik) .

Pengembangan konsep ini didorong oleh gejala meningkatnya hambatan-hambatan administrasi dan politik dalam pembangunan dunia ketiga. Gejala tersebut antara lain meningkatnya korupsi, kolusi, nepotisme, individualisme sena hilangnya legitimasi politik khususnya pada negara-negara yang kurang mampu dan tanpa sistem demokrasi yang memadai. Berlawanan dari konsep ideal yang ingin dikembangkan, bad governance (pemerintahan yang buruk) menjadi alasan bagi lembaga internasional untuk mengembangkan pola yang lebih mungkin dalam kaitan dengan manajemen ekonomi dan politik global.²⁶

²⁶ Muhadam Lobollo, *Memahami Pemerintahan*, Cet -7 (Jakarta : Raja Grapindo), Hlm. 23

Dalam perspektif negara-negara maju, dua alasan utama yang mendorong lahirnya gagasan penciptaan pemerintahan yang baik adalah *pertama*, gagalnya pemerintah menjalankan fungsinya yang ditandai oleh tidak bekerjanya hukum dan tata aturan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah tentang bagaimana seharusnya pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya. ini tentu saja berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah pada masyarakatnya, demikian pula kewajiban dan hak yang saling mengikat antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah.

Kedua, tekanan kelompok neo-liberal yang mendukung dikurangnya peran negara dan pengimbangan kekuasaan kepada penyediaan layanan oleh pembeli dan pengatur. Atau dengan kata lain, pemangkasan peran pemerintah sejauh mungkin dengan cara penyerahan kepentingan antara penjual dan pembeli pada mekanisme pasar. Sekalipun upaya upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dilakukan misalnya melalui desentralisasi kekuasaan, reformasi pemerintahan, reorientasi birokrasi serta perluasan partisipasi publik untuk mengembalikan akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi, namun bukan berarti sepi dari dampak pengelolaan pemerintahan. Di negara-negara berkembang, kebijakan demikian semakin memperkokoh tumbuhnya demokrasi liberal yang pada akhirnya mendorong kembalinya pemerintah (eksekutif) meningkatkan konuol yang lebih represif. Bagaimanapun kita masih percaya bahwa menciptakan pemerintahan yang kuat mudak dibutuhkan bagi stabilitas politik yang menjadi jaminan bagi keberhasilan pembangunan.²⁷

²⁷ *Ibid*, Hlm. 23

4. Organisasi

Pengertian tentang perilaku organisasi telah di kemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Sikap dan perilaku orang yang beraneka ragam dalam organisasi ini dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola organisasi secara efektif. Secara konseptual, Robbins and Judge (2013) memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Sebagai suatu bidang studi, Perilaku Organisasi mempelajari tiga determinan dalam organisasi yaitu individu/ perorangan, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi menerapkan pengetahuan tentang perilaku yang dikaitkan dengan aktivitas kerja dan hasil kerja anggota organisasi.²⁸

Ada dua hal fokus perilaku organisasi yaitu tindakan (actions) dan sikap (attitudes) dari orang-orang dalam organisasi (Ratmawati dan Herachwati, 2007). Bidang studi perilaku organisasi ini merupakan ilmu pengetahuan yang diturunkan dari studi tentang tindakan dan sikap manusia. Sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi terdiri atas suatu kumpulan teori maupun model sebagai Ways

²⁸ Wayan Gede Supartha, Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi Teori, Kasus, Dan Aplikasi Penelitian*, Cet 1 (Denpasar : Setia Bhakti), Hlm. 1

of Thinking tentang fenomena tertentu. Perilaku organisasi sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari guna menyelesaikan berbagai masalah perilaku manusia dalam organisasi, menawarkan tantangan untuk memahami berbagai kompleksitas organisasi. Hal ini sangat mendukung pemahaman bahwa banyak persoalan organisasi mempunyai berbagai sebab, sehingga pendekatan penyelesaian persoalan organisasi mengacu pada kondisi dan situasi manusia dalam organisasi yang bersangkutan.

George & Jones (2002) menyatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan (act) individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Dalam hal ini George & Jones, sebagaimana juga Robbins and Judge (2013) maupun Gordon (2002), memberi gambaran bahwa studi tentang perilaku organisasi ini menyediakan serangkaian alat yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi.²⁹

Bagi para manajer, mempelajari perilaku organisasi dapat membantu memperbaiki, mendorong, atau merubah perilaku kerja, baik individu, kelompok maupun organisasi secara keseluruhan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perilaku organisasi sangat fokus pada “Human Side of Management” sehingga pendekatan bidang ini dalam manajemen adalah pendekatan keperilakuan (Behavioral approach to

²⁹ Wayan Gede Supartha, Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi Teori, Kasus, Dan Aplikasi Penelitian*, Cet 1 (Denpasar : Setia Bhakti), Hlm. 1-2

management). Pengetahuan yang diperoleh dengan mempelajari perilaku organisasi ini dapat membantu manajer mengidentifikasi problem, menentukan bagaimana cara koreksinya, dan mengetahui bahwa perubahan-perubahan akan membuat suatu perbedaan, yakni dengan menggunakan pendekatan keperilakuan.³⁰

Peran Pemuda

5. Peran Pemuda

Berdirinya Budi Utomo pada tahun 19081 sebenarnya telah menjadi tonggak yang cukup kuat bagi perkembangan pergerakan nasional. Menurut sejawaran yang ada di Indonesia maupun luar negeri, Budi Utomo merupakan mercusuar bagi pergerakan nasional Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini mulai muncul penafsiran baru. Tafsir baru itu antara lain menyatakan bahwa pergerakan nasional sudah ada dan dimulai sejak Sarekat Islam, yang faktanya lebih dulu ada dan bersifat massa bila dibandingkan dengan Budi Utomo yang hanya bergerak di kalangan bangsawan Jawa. Namun, dengan alasan bahwa organisasi modern sudah dimiliki oleh Budi Utomo lantas argument tersebut menjadi kesepakatan sebagai titik pergerakan nasional di Indonesia, tetapi yang utama nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh kaum intelektual.³¹

Perbedaan tafsir boleh saja dalam sejarah, karena sejarah akan menjadi menarik, dengan demikian dialog antara sejarawan dan sejarah akan terus menarik

³⁰ Wayan Gede Supartha, Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi Teori, Kasus, Dan Aplikasi Penelitian*, Cet 1 (Denpasar : Setia Bhakti), Hlm. 2

³¹ Aloysius Bram Widyanto, *Pemuda Dalam Perubahan Sosial*, Jurnal Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk dikaji dan diikuti. Demikian halnya dengan melihat sejarah terutama peran pemuda akan menarik, karena di mana ada gerakan perubahan, maka dapat dipastikan ada unsur pemuda di dalamnya. Tanpa pretensi untuk mengecilkan peran dari kelompokkelompok lain dalam masyarakat yang juga turut serta di dalam gerakan perubahan. Perhimpunan Indonesia bergerak dalam menuntut perubahan walaupun mereka sedang belajar dan berada di Belanda.³ Kecintaan mereka terhadap tanah air yang membuat mereka terus bergerak.

Di kalangan pemuda terdapat gerakan Tri Koro Darmo, Jong Java, Jong Celebes Bond, Jong Sumatra Bond, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, dan Indonesia Muda. Pada tanggal 30 April 1926 mereka mengadakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Dalam kongres dihasilkan keputusan untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia II, dan semua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Kemudian Kongres Pemuda II diadakan tanggal 27-28 Oktober 1928, disepakati tiga keputusan pokok yaitu:

- 1) Dibentuknya suatu badan fusi untuk semua organisasi pemuda.
- 2) Menetapkan ikrar pemuda Indonesia bahwa mereka:
 - a) Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
 - b) Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
 - c) Menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia.
- 3) Asas ini wajib dipakai oleh semua perkumpulan di Indonesia.³²

³² Aloysius Bram Widyanto, *Pemuda Dalam Perubahan Sosial*, Jurnal Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil ini menjadi pondasi bagi persatuan Indonesia. Lagu yang berjudul Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman yang dikumandangkan membangkitkan semangat para pesertanya. Dan Sumpah Pemuda tiada lain adalah ungkapan sejarah manusia Indonesia.

Berdasar pada sejarah, pemuda merupakan unsur yang menarik dan esensial dalam suatu gerakan perubahan, maka menarik untuk dikaji. Karena di dalam jiwa pemuda terdapat kerelaan berkorban demi cita-cita. Di dalam pemuda terdapat api idealisme yang tidak menuntut balasan, baik berupa uang atau kedudukan. Di dalam pemuda terdapat semangat yang selalu membara. Bersama pemuda kita menentang segala kekuasaan yang tiran. Bersama pemuda, kapal yang bernama Indonesia akan ditentukan maju, diam atau tenggelam.

Pada masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Berdirinya dipelopori oleh Pemuda Sutomo dan kawankawan yang merasa tergugah hatinya dengan keadaan yang menimpa masyarakat Indonesia atau Jawa pada khususnya dan awalnya. Organisasi ini secara keorganisasian sudah dianggap maju bila dibandingkan dengan organisasi pemuda lainnya yang ada di Nusantara.³³

Pada awal abad ke-XX di Indonesia ditandai dengan semakin kerasnya politik kolonial Belanda. Politik kolonial Belanda yang demikian represif membuat kehidupan rakyat semakin menderita. Kemudian muncul perhatian

³³Aloysius Bram Widyanto, *Pemuda Dalam Perubahan Sosial*, Jurnal Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terhadap kedudukan dan keadaan penduduk pribumi. Bangkitlah tuntutan terhadap perbaikan nasib pribumi. Pemerintah kolonial Belanda menjawab tuntutan dari kalangan agamawan, ataupun partai sosialis yang sering menyebut dirinya sebagai kaum humanis dengan melaksanakan politik Ethis. Politik Ethis dalam pelaksanaannya kurang memuaskan, namun dalam bidang pendidikan suka atau tidak program tersebut telah melahirkan suatu kelas baru yang dikenal sebagai kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini yang kemudian berkumpul, berdiskusi dan akhirnya mereka membuat kelompok-kelompok. Dalam kelompokkelompok maka terbentuk organisasi seperti Budi Utomo. Ada juga, Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Melalui organisasiorganisasi tersebut maka tersebut nama-nama seperti, Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Tirtoadisuryo, Semaun, Tan Malaka, Hatta dan Sukarno.

Mereka hanya sekulimit pemuda yang mencoba memahami keadaan-keadaan sosial masyarakat dan coba mengambil aksi. Dalam kegiatan tersebut tak jarang tangan besi penguasa kolonial Belanda membuatnya lemah, namun mereka terus berusaha bergerak, berjuang dalam memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Usaha-usaha itu dilakukan dalam bidang budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Dalam suasana Perang Dunia I, yang menimbulkan kesadaran untuk menentukan nasib sendiri.³⁴

³⁴Aloysius Bram Widyanto, *Pemuda Dalam Perubahan Sosial*, Jurnal Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang keluar sebagai pihak yang kalah, maka di Indonesia pada waktu itu yang berada dalam penguasaan Jepang terjadi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Dalam kekosongan kekuasaan tersebut lagilagi pemuda menuntut Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya atas nama Sukarno-Hatta. Lahirlah apa yang disebut sebagai nasion Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menurut Ben Anderson disebut sebagai revolusi pemuda.

Dalam zaman revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda mencoba untuk menguasai Indonesia kembali, maka terjadilah agresi militer Belanda I dan II. Pada zaman revolusi, dalam rangka mempertahankan negara yang baru lahir dari serangan musuh. Pemuda Indonesia berada di garda paling depan dalam menghalau kekuatan musuh. Mereka merelakan jiwa dan raganya demi ibu pertiwi yang mereka cintai. Di sini pemuda turun menjadi motor penggerak utama revolusi kemerdekaan Indonesia.³⁵

Pada jaman pemerintahan di bawah kekuasaan presiden Sukarno yang mengabaikan kepentingan rakyat dan cenderung mengarah ke diktatktor. Pemuda kembali bergerak, mereka turun ke jalan¹² membentuk pendapat umum dan menyuarakan penderitaan rakyat. Akhirnya rezim Sukarno jatuh dan muncullah Suharto sebagai presiden baru dengan harapan yang baru pula. Pemuda kembali

³⁵Aloysius Bram Widyanto, *Pemuda Dalam Perubahan Sosial*, Jurnal Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memainkan perannya dalam mengakhiri masa otoriter rezim Suharto setelah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun lamanya. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan dan masyarakat bersatu menuju gedung DPR-MPR RI dan mendesak Presiden Suharto untuk mundur dari tampuk kekuasaan. Masa otoriter pemerintahan Suharto dapat diakhiri. Indonesia memasuki jaman reformasi. Reformasi dianggap sebagai jaman kebebasan setelah rakyat terbelenggu dalam jaman otoriter. Namun Keadaan Indonesia tak kunjung membaik.

Tidak dapat dibantah bahwa peristiwa yang terjadi hampir setengah abad yang lalu, yaitu Sumpah Pemuda, mempunyai arti tersendiri dalam perkembangan bangsa kita. Dapatlah dikatakan bahwa pada tahun 1928 itu, fondasi kesatuan dan persatuan bangsa diletakkan, khususnya melalui tekad penyatuan segi bahasa dengan mengangkat bahasa Indonesia. Seorang warga Indonesia yang bertemu dengan seseorang dari negara berkembang, juga sebagian negara maju, akan merasakan betapa kemampuan kita berintegrasi secara nasional melalui bahasa persatuan sangat menarik perhatian dan mengagumkan mereka.³⁶

Dalam keadaan kita tidak memiliki begitu banyak hal-hal yang dibanggakan sekalipun, bahasa Indonesia sebagai milik nasional kita akan selalu menjadi sumber kemantapan pada diri sendiri dalam bernegara dan berbangsa. Maka memang sudah sepantasnya, setelah sekian lama melalui liku-liku proses yang panjang, pada tahun ini Sumpah Pemuda tidak hanya diperingati secara

³⁶Budhy Munawar-Rachman, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Cet- 1 (Jakarta Selatan : Nurcholish Madjid Society (Ncms)). Hlm. 2257



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seremonial, tetapi dengan suatu kongres pemuda yang dimaksudkan untuk mencoba mencari perumusan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan. Perlu diingatkan bahwa yang dikehendaki ialah partisipasi.

Biasanya istilah itu dipertentangkan atau dilawankan dengan istilah mobilisasi. Dalam partisipasi terdapat dorongan emosional atau motivasi yang inheren pada pihak pelaku partisipasi sendiri yaitu rakyat, atau lebih khusus dalam hal ini pemuda. Karena itu partisipasi dilakukan dengan kesungguhan hati dan antusiasme, yang menjadi sumber tenaga, dan yang pada gilirannya nanti halhal itu amat erat hubungannya dengan produktivitas. Sedangkan mobilisasi merupakan hasil pengerahan tenaga oleh pihak yang sedang berkuasa, yang dengan sendirinya mengimplikasikan adanya paksaan. Karena itu mobilisasi selalu disangkutkan dengan pemerintahan yang kelewat kuat atau malah arbitrer sebagaimana terdapat di negara-negara komunis. Korelasi mobilisasi adalah resimentasi, yaitu suatu kebiasaan memaksakan disiplin dari atas, termasuk pengingkaran hak menentukan dan memilih sendiri pemimpin yang dikehendaki. Dan sesungguhnya cara-cara yang koersif atau memaksa-maksa serupa itu adalah petunjuk dari tidak adanya kemantapan kepada diri sendiri.³⁷

Orang-orang atau kelompok-kelompok yang memperoleh kekuasaan secara tidak wajar, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pemerintahan di dunia ini, khususnya dunia komunis, akan selalu bersandar pada praktik praktik koersif untuk memelihara kelangsungan kekuasaannya dari ancaman penggulingan atau

³⁷ Budhy Munawar-Rachman, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Cet- 1 (Jakarta Selatan : Nurcholish Madjid Society (NCMS)). Hlm.1257-1258



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

coup d'etat yang selalu dikhawatirkan. Maka cara yang tidak demokratis itu selayaknya tidak dilakukan oleh penguasa yang kenaikannya melalui jenjang-jenjang dan caracara yang taat-asas atau konsisten dengan nilai-nilai demokrasi. Hal itu dikemukakan tentu saja bukannya tanpa relevansi dengan apa yang berkembang akhir-akhir ini di tanah air kita.³⁸

H. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terkait dengan Peran Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi, masih terus menjadi kajian di kalangan cendekiawan dan akademisi ada beberapa penelitian yang sesuai seperti dengan penelitian ini sebagaimana keterangan berikut :

Pada Penelitian Suyanto Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, UWGM Samarinda, dengan judul *Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang diperlukan untuk melakukan pembinaan Kepemudaan di Kota Samarinda. Penelitian ini didasari oleh kompleksitasnya permasalahan pemuda baik dari sisi positif dan negatifnya serta pentingnya peran pemuda sehingga diperlukan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perlu adanya pembinaan dan pengembangan kepemudaan secara terstruktur,

³⁸ Budhy Munawar-Rachman, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Cet- 1 (Jakarta Selatan : Nurcholish Madjid Society (Ncms)). Hlm.1258

terprogram dan berkesinambungan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih peran dalam pengembangan kepemudaan.³⁹

Jurnal Elly Kumari Tjahya Putri, *Pengembangan Model Pemberdayaan Karang Taruna Terpadu Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Dalam penelitian ini beliau menjelaskan Remaja mempunyai kesempatan untuk berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial untuk menanggulangi masalah sosial di lingkungannya melalui wadah Karang Taruna. Oleh sebab itu, Karang Taruna perlu diberdayakan agar mampu mendorong keterlibatan aktif remaja dalam usaha kesejahteraan sosial. Kajian ini menggunakan penelitian tindakan untuk menemukan metode pemberdayaan Karang Taruna yang efektif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pemberdayaan Karang Taruna terpadu mampu meningkatkan kemampuan kader pengurus Karang Taruna dari aspek manajerial, kaderisasi, serta profesionalitas dalam usaha kesejahteraan sosial, serta meningkatkan keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam pembinaan Karang Taruna. Dari hasil penelitian direkomendasikan perlunya: (1) pengembangan kegiatan rekreatif remaja sesuai dengan usianya, (2) pembinaan intensif oleh dinas sosial Kabupaten/Kota, (3) pengembangan jaringan kerja antar Karang Taruna, maupun dengan instansi terkait sebagai pembina (Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan, sosial), dan (4) pengembangan jejaring kerja sama dengan skema CSR (Corporate Social Responsibility).⁴⁰

³⁹ Suyanto Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, UWGM Samarinda, dengan judul *Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda*, Juni 2018.

⁴⁰ Jurnal Elly Kumari Tjahya Putri, *Pengembangan Model Pemberdayaan Karang Taruna Terpadu Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Volume 12 Nomor 1, Juni 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mifdal Zusron Alfaqi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang , *Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)* Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Penelitian ini dilakukan pada Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah (1), mengetahui peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi, (2), mengetahui implikasi peran pemuda terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana subyek penelitian adalah Satgas Muda Anti Korupsi dan obyek penelitian adalah peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah.⁴¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas Muda Anti Korupsi berperan dalam upaya pencegahan korupsi Kota Yogyakarta. Peran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) pendidikan anti korupsi, (2) sosialisasi anti korupsi, (3), pengawasan kepada pemerintah. Kendati demikian, dalam melakukan peran terdapat kendala yang dihadapi yaitu (1), energi anggota masih belum bisa optimal, (2) kurangnya pemahaman permasalahan korupsi oleh anggota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dengan meningkatkan energi anggota serta meningkatkan pemahaman korupsi melalui kegiatan dan

⁴¹ Mifdal Zusron Alfaqi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang , *Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)* Tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelatihan. Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi ini berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta dengan kriteria yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek keamanan.⁴²

Dari tiga penelitian diatas sama dengan yang di teliti perbedaannya terletak kepada objek kajiannya. Peneliti mengambil Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi, bagaimana pemerintah berperan aktif terhadap organisasi kepemudaan, dan Dalam metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴²Mifdal Zusron Alfaqi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang , *Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)* Tahun 2017

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴³ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Muaro Jambi, karena sesuai dengan judul permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah dengan keadaan di lapangan. Dalam hal ini unsur geografis tempat penelitian akan membawa pengaruh terhadap isi pembahasan, sehingga memberikan suatu diskursus yang objektif sesuai dengan kenyataan lapangan hingga tercapailah tujuan ilmu pengetahuan yaitu kebenaran antara teori dan realitas lapangan.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi dari Bulan Mei 2017 sampai Oktober 2019.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* dan jenis penelitian dengan kata lain adalah jenis pendekatan

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm 126

hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.⁴⁴ Dalam hal ini sesuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang terkumpul kemudian menuju pada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁵

C. Jenis penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif deskriptif*. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrument pengumpulan data.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Demikian juga menurut Kirk dan Miller, bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁴⁶

⁴⁴ Bambang Wahiyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Hlm.12

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 16

⁴⁶ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian kualitatif dapat dihubungkan dengan lima jenis pendekatan yaitu penelitian kualitatif dengan kategori penelitian biografi (naratif), fenomenologi, grounded theory, etnografi dan studi kasus.⁴⁷

Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan, sebagai studi kasus, penelitian ini juga ingin mengurai serta menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau situasi sosial.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah praktek dalam Peran Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dapat digambarkan dengan baik. Khususnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini untuk mencari informasi faktual yang mendekati gejala yang ada. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung serta mengetahui secara langsung yang dikerjakan orang dalam menangani masalah atau situasi yang sama.⁴⁸

⁴⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, (Jambi: Syari'ah Press, 2004). Hlm.31-32

⁴⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali,1992), Hlm1 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi lapangan dan melalui hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang tersangkut didalamnya. Data ini seperti langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁹ Data primer atau data tangan pertama, merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵⁰

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan tentang Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun yang bersangkutan tersebut adalah : Kabid Pemuda dan Olahraga DISPARPORA, Kabag Umum dan Keuangan DISPARPORA, Ketua Umum Satma Pemuda Pancasila, Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi, Ketua KNPI Muaro Jambi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara

⁴⁹Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press Iain Sts 2014), Hlm 34

⁵⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm 91

mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.⁵¹

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, data yang dimaksud adalah berupa dokumen berupa profil Muaro Jambi, organisasi kepemudaan, peraturan, Undang-Undang, karya ilmiah dan dokumen lain yang bersangkutan Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana data itu didapat dan diperoleh. Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

Tabel I
INFORMAN

No	Informan	Jumlah
1	DISPARPORA	2
2	Sekretari Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi	1
3	Ketua KNPI	1
4	Ketua Satma Pemuda Pancasila	1 ⁵²

⁵¹Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press Iain Sts 2014), Hlm 34

⁵² Tabel Informan

F. Unit Analisis Data

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dengan sampling kita memilih subjek (individu) atau (benda) yang diambil dari satu kesatuan atau keseluruhan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesatuan atau keseluruhan tersebut.⁵³

Penelitian ini dilakukan terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi, maka unit analisis yang diterapkan adalah Kepala Dinas Disparpora, Kepemudaan, Kepala Organisasi Kepemudaan, Ketua Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Muaro Jambi.

Untuk menentukan unit analisis data peneliti menggunakan sistem *purposive sampling* yaitu subjek dari penelitiannya sudah ditentukan dan hanya diambil pada orang-orang tertentu atau orang-orang yang mendalami bidang penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini menggunakan metode-metode :

⁵³Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit. 2004), Hlm 101

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁵⁴

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi sistematis yang merupakan salah satu dari jenis observasi. Observasi sistematis biasa disebut dengan observasi berkerangka. Sebelum mengadakan observasi terlebih dahulu dibuat kerangka mengenai berbagai faktor dan ciri-ciri yang akan di observasi.⁵⁵ Dengan demikian, data yang diperoleh oleh peneliti dari responden maupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.

Wawancara yang penulis maksud disini adalah penulis akan menanyakan langsung kepada Kabid Pemuda dan Olahraga DISPARPORA, Kabag Umum dan Keuangan DISPARPORA, Ketua Umum Satma Pemuda Pancasila, Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi, Ketua KNPI Muaro Jambi.

⁵⁴Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.Ke-5, (Bandung:Alfabeta,2013), Hlm 105

⁵⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta:Premanada Media Group, 2013), Hlm 131

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sejumlah dokumen-dokumen tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁶ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan, Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi penulis digunakan sebagai instrument untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan yang diteliti.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen yang dikeluarkan oleh tokoh masyarakat dan para pengurus dan anggota kepemimpinan adat dan pemerintahan desa. Dapat pula berupa gambar dan rekaman video hasil wawancara yang didapat dari para nara sumber

H. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data peneliti akan mengumpulkan data terlebih dahulu guna untuk terarahnya penelitian, setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa data, barulah setelah itu penyimpulan data.

Analisis yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi. Berdasarkan hal di atas dapat dikemukakan bahwa analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara

⁵⁶Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-15, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber lain sehingga dapat dipahami dengan mudah serta membuat kesimpulan dengan tujuan agar dapat menginformasikan dan mudah dipahami oleh orang.⁵⁷

Data yang telah ditranskripkan kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan ditempatkan ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberi tanda. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang diperoleh.⁵⁸

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah terdiri dari lima bab pembahasan dengan sub-sub bahasan yang sesuai dengan kebutuhan sebagai mana berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

BAB II METODE PENELITIAN

BAB ini berisitentang mengenai metode penelitian yang mencakup tempat dan subyek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis "Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif.*, R &D, (Bandung:Alfabeta,2013), Hlm 427
⁵⁸ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press Iain Sts 2014), Hlm69

BAB ini berisi gambaran umum mengenai lokasi (objek) penelitian, struktur organisasi pemerintahan dan sebagainya.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan uraian data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian.

BAB V PENUTUP

Sebagai BAB terakhir penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, saran-saran yang diberikan kepada objek penelitian untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, dan saran-saran penelitian yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

J. Jadwal Penelitian

Table 2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019																									
		Tahun 2019				Tahun 2019				Tahun 2019				Tahun 2019													
		Juni		Juli		Agustus				Juni		Juli		Agustus				Septemb er				Oktober					
1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan judul	X	X																								
2	Pembuatan proposal				X	X																					
3	Perbaikan proposal dan seminar						X			X			X														
4	Surat izin riset														X												
5	Pengumpulan data									X			X				X	X									
6	Pengolahan dan analisis data														X	X	X	X									
7	Bimbingan dan Perbaikan															X	X	X	X	X							
8	Agenda dan Ujian																										
9	Perbaikan dan penilid																										

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Administratif Wilayah

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai Ibukota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis yang strategis, berada di hinterland Kota Jambi. Hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan Kota Jambi, seperti pemasaran hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa.⁵⁹

Secara geografis, Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 1051' - 2001' Lintang Selatan dan diantara 103015' - 104030' Bujur Timur dengan luas wilayah 5.264 Km² dan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

⁵⁹ Muaro Jambi Dalam angka 2017

Secara administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, 150 desa dan 5 kelurahan. Nama-nama kecamatan dan ibukota kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi antara lain:

1. Kecamatan Mestong dengan Ibukota Sebapo
2. Kecamatan Sungai Bahar dengan Ibukota Marga
3. Kecamatan Bahar Selatan dengan Ibukota Tanjung Mulya
4. Kecamatan Bahar Utara dengan Ibukota Talang Bukit
5. Kecamatan Kumpeh Ulu dengan Ibukota Pudak
6. Kecamatan Sungai Gelam dengan Ibukota Sungai Gelam
7. Kecamatan Kumpeh dengan Ibukota Tanjung
8. Kecamatan Maro Sebo dengan Ibukota Jambi Kecil
9. Kecamatan Taman Rajo dengan Ibukota Kemingking Dalam
10. Kecamatan Jambi Luar Kota dengan Ibukota Pijoan
11. Kecamatan Sekernan dengan Ibukota Sengeti⁶⁰

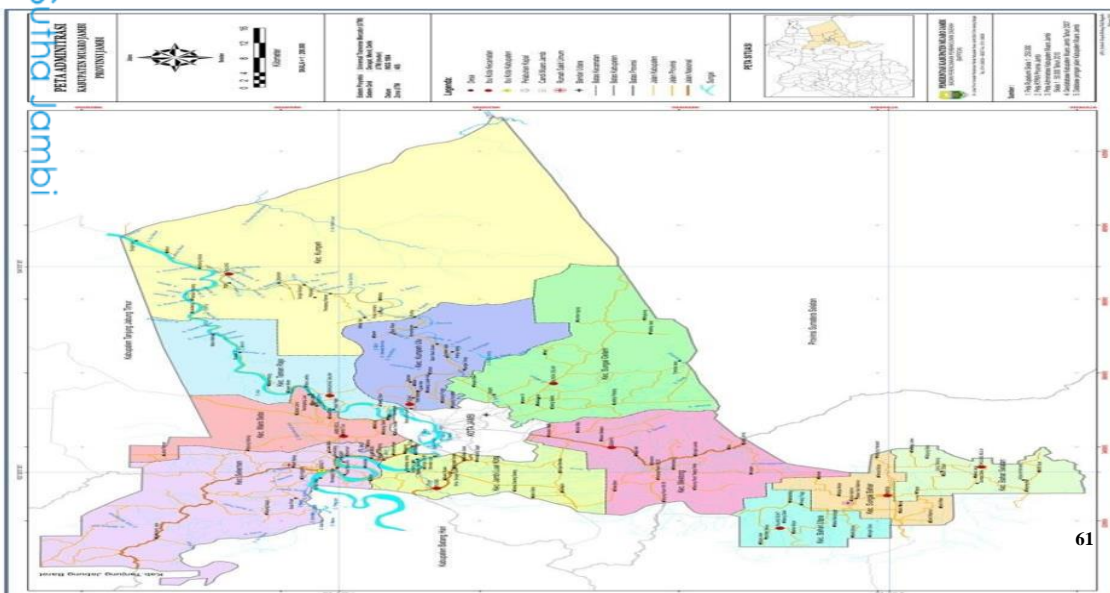
⁶⁰ Muaro Jambi dalam Angka 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel I
Peta Muaro Jambi



B. Gambaran Demografi

Sebagai gambaran umum terhadap kependudukan di Kabupaten Muaro Jambi tahun terakhir yang dituangkan dalam Muaro Jambi Dalam Angka 2014 (merupakan hasil proyeksi dari sensus penduduk 2010) jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 376.619 jiwa.

⁶¹ Peta Muaro Jambi 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Tabel II
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mestong	474,70	9,02	41.171	10,93	86,73
2.	Sungai Bahar	160,50	3,05	26.245	6,97	163,52
3.	Bahar Selatan	195,65	3,72	14.729	3,91	75,27
4.	Bahar Utara	167,26	3,18	15.216	4,04	90,97
5.	Kumpeh Ulu	386,65	7,34	50.506	13,41	130,62
6.	Sungai Gelam	654,41	12,45	62.896	16,70	96,11
7.	Kumpeh	1.658,93	31,51	25.259	6,71	15,22
8.	Maro Sebo	261,47	4,97	20.238	5,37	77,40
9.	Taman Rajo	352,67	6,70	12.589	3,34	35,70
10.	Jambi Luar Kota	280,12	5,32	64.113	17,02	228,88
11.	Sekernan	671,60	12,76	43.657	11,59	65,00
JUMLAH		5.264,00	100,00	376.619	100,00	71,55⁶²

Penduduk yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, rata-rata didominasi oleh kelompok usia muda. Dari jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum pada tabel dibawah menunjukkan bahwa jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah penduduk ini disebabkan oleh pertumbuhan alami maupun pengaruh migrasi. Adapun distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per-Kecamatan pada tahun 2013 di Kabupaten Muaro Jambi dijelaskan pada tabel berikut :

⁶² Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013

Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013

No	Kecamatan	Penduduk (orang)			Rasio Jenis Kelamin (sex ratio)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mestong	21.235	19.936	41.171	1,06
2.	Sungai Bahar	13.855	12.390	26.245	1,12
3.	Bahar Selatan	7.662	7.067	14.729	1,08
4.	Bahar Utara	8.090	7.126	15.216	1,14
5.	Kumpeh Ulu	25.982	24.524	50.506	1,06
6.	Sungai Gelam	32.985	29.911	62.896	1,10 ⁶³

Tabel 4
Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk (orang)			Rasio Jenis Kelamin (sex ratio)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Kumpeh	12.920	12.339	25.259	1,05
8.	Maro Sebo	10.308	9.930	20.238	1,04
9.	Taman Rajo	6.431	6.158	12.589	1,04
10.	Jambi Luar Kota	32.691	31.422	64.113	1,04
11.	Sekernan	22.520	21.137	43.657	1,06
JUMLAH		194.679	181.940	376.619	1,07⁶⁴

⁶³ Jumlah Penduduk Menurut JenisKelamin Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013

⁶⁴ Berdasarkan Kecamatan Muaro Jambi 2013

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah total sebanyak 376.619 orang terdiri dari penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 194.679 orang dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 181.940 orang.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan

No (1)	Nama Kecamatan (2)	Jumlah keluarga miskin (KK) (3)
1.	Kec. Mestong	2.104
2.	Kec. Sungai Bahar	594
3.	Kec. Bahar Selatan	746
4.	Kec. Bahar Utara	695
5.	Kec. Kumpeh Ulu	2.782
6.	Kec. Sungai Gelam	1.729
7.	Kec. Kumpeh	2.817
8.	Kec. Maro Sebo	1.709
9.	Kec. Taman Rajo	1.334
10.	Kec. Jambi Luar Kota	2.962
11.	Kec. Sekernan	2.449
TOTAL		19.921⁶⁵

Sumber : Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka Tahun 2013

C. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Capaian kemajuan pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2012 telah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kelulusan SD, SMP hingga SMA/SMK yang mencapai 100%. Disamping itu peningkatan perkembangan pendidikan juga terlihat dengan semakin berkembangnya minat belajar anak usia sekolah di berbagai jenis bidang studi dan jenjang pendidikan. Selain itu, pelaksanaan program pendidikan juga telah menunjukkan perkembangan yang meningkat dengan adanya penyediaan

⁶⁵ Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan 2013

pelayanan pendidikan yang semakin luas dan menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk yang relatif sedikit dan daerah yang rentang kendalanya lebar dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama disesuaikan kebutuhan. Perkembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat SD, tingkat SMP, serta tingkat SMA, dilihat dari jumlah sekolah dan jumlah siswa/siswi.

Tabel VI
Perkembangan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sarana Tahun 2011	Jumlah Murid 2011	Jumlah Sarana Tahun 2012	Jumlah Murid 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TK/RA	128	3.425	153	4.853
2.	SD/MIN/MIS	261	43.825	269	44.842
3.	SMP/MTsN/MTsS	111	15.323	112	16.473
4.	SMA/MAN/MAS/SMK	42	8.570	45	9.020
Jumlah		542	71.143	579	75.188⁶⁶

Sumber : Profil Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2011 sebanyak 542 unit meningkat menjadi 579 unit pada tahun 2012. Sedangkan jumlah murid pada tahun 2011 sebanyak 71.143 murid meningkat menjadi 75.188 murid pada tahun 2012.

⁶⁶ Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan

Tabel VII
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muaro Jambi

No	Tahun	Penduduk Miskin (orang)	%	Garis Kemiskinan (Rp/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2007	21.914	7,13	158.962
2	2008	13.700	4,35	165.606
3	2009	14.400	4,54	182.534
4	2010	18.200	5,29	209.182
5	2011	17.600	4,98	217.659
6	2012	18.756	5,08	225.169
7	2013	18.800	5,13	233.733 ⁶⁷

Sumber : Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka Tahun 2013

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2007 sampai tahun 2008 menurun dari 21.914 orang menjadi 13.700 orang. Sampai pada tahun 2008 meningkat menjadi 18.200 orang dan terus meningkat lagi sampai pada tahun 2013 menjadi 18.800 orang.

⁶⁷ Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka Tahun 2013

Tabel VIII
Perkembangan PDRB Kabupaten Muaro Jambi

Lapangan Usaha	2009 (jutaan rupiah)	2010 (jutaan rupiah)	2011 (jutaan rupiah)	2012 (jutaan rupiah)	2013 (jutaan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha					
1. Pertanian	1.040.815,21	1.261.408,05	1.484.434,65	1.782.853,90	2.152.447,13
a. Tanaman bahan makanan	209.041,29	273.538,00	363.468,49	450.577,59	548.412,17
b. Tanaman perkebunan	541.039,06	651.604,39	742.169,72	902.627,64	1.103.629,51
c. Peternakan	77.359,04	91.539,94	102.720,84	118.098,57	137.176,96
d. Kehutanan	144.325,27	162.738,80	181.152,33	201.649,30	230.904,07
e. Perikanan	69.050,55	81.986,91	94.923,27	109.900,80	132.324,42
2. Pertambangan dan penggalian	1.043.645,46	1.058.837,46	1.089.706,65	1.211.019,87	1.338.945,32
3. Industry pengolahan	401.022,41	478.277,80	535.548,72	615.662,78	716.939,75
4. Listrik, gas dan air bersih	6.513,11	10.209,30	12.735,88	15.633,83	19.141,50
5. Bangunan	151.130,48	199.320,06	256.435,39	322.715,76	400.458,17
6. Perdagangan, hotel dan restoran	487.264,47	632.039,45	758.812,43	910.277,68	1.077.693,12
7. Pengangkutan dan komunikasi	85.077,46	99.565,36	112.316,15	123.386,59	137.450,52
8. Keuangan, persewaan dan jasa Perusahaan	78.344,14	92.799,04	108.693,94	123.953,10	142.917,04
9. Jasa-jasa	246.090,34	311.886,57	363.072,80	432.103,35	508.482,15
TOTAL	3.539.903,08	4.144.343,08	4.721.756,61	5.537.606,85	6.494.474,71
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha					
1. Pertanian	394.007,02	432.082,82	472.658,62	516.490,60	564.855,82
a. Tanaman bahan makanan	99.622,13	110.144,70	125.867,27	138.432,32	151.644,20
b. Tanaman perkebunan	195.232,76	217.290,15	236.347,54	261.858,00	289.746,38
c. Peternakan	29.877,36	31.282,75	33.788,14	35.686,33	38.127,51
d. Kehutanan	48.496,50	51.070,70	53.544,90	56.138,97	58.777,50
e. Perikanan	20.778,27	22.294,52	23.110,77	24.374,98	26.560,23
2. Pertambangan dan penggalian	233.005,43	235.845,73	240.889,09	243.701,93	248.988,71
3. Industry pengolahan	176.143,20	183.527,25	191.249,30	202.795,96	217.430,54
4. Listrik, gas dan air bersih	1.790,65	2.323,17	2.608,34	2.924,81	3.282,40
5. Bangunan	38.012,96	43.065,15	48.717,34	55.050,80	63.199,68
6. Perdagangan, hotel dan restoran	168.993,37	185.255,57	202.090,68	220.708,75	240.853,65
7. Pengangkutan dan komunikasi	36.457,39	39.630,13	41.577,78	43.944,69	47.117,62
8. Keuangan, persewaan dan jasa Perusahaan	25.540,56	26.681,46	28.181,77	30.246,61	32.526,48
9. Jasa-jasa	69.243,91	74.376,36	80.198,86	87.181,57	92.672,89
TOTAL	1.143.194,49	1.222.787,64	1.308.171,78	1.403.045,73	1.510.927,79⁶⁸

⁶⁸ Perkembangan PDRB Kabupaten Muaro Jambi 2013

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Membina Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur urusan daerahnya sendiri.⁶⁹ Menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan dalam hal ini masalah organisasi kepemudaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi membuat struktur organisasi, yakni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasi-organisasi kepemudaan.

Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang kemudian disingkat dengan Dispaspora. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga membawahi 4 bidang, yakni bidang pengembangan usaha dan pemasaran kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata, Bidang Kepemudaan, dan Bidang Keolahragaan. Bidang Kepemudaan kemudian bertanggung jawab dalam organisasi kepemudaan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebuah Kabupaten. Disamping itu Dinas

⁶⁹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), Hlm.25.

Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga membina organisasi kepemudaan kurang kepedulian dalam menjalankan tugas dan fungsinya bentuk ketidak pedulian pemerintah daerah dalam hal pembinaan organisasi kepemudaan dapat dilihat dari tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus dibuat untuk membahas tentang organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi sehingga hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang lamban oleh pemerintah daerah dalam hal menangani masalah organisasi kepemudaan.

Orsnisasi kepemudaan seperti : Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Kabupaten Muaro Jambi (SAPMA-PP Kabupaten Muaro Jambi). Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Muaro Jambi (KNPI Kabupaten Muaro Jambi) dan Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi (IMMJ). tiga organisasi kepemudaan ini adalah organisasi kepemudaan yang paling banyak berkontribusi terhadap Kabupaten Muaro Jambi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya program kerja yang telah dilaksanakan yang tujuannya demi membangun generasi muda di Kabupaten Muaro Jambi. Menurut wawancara dengan Wawancara dengan Hatimah Kabag Umum dan Keuangan Disparpora.

Bahwa kami sudah melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap pemuda dengan selaku ikut handil dalam kepemudaan sebagai contoh

kami selalu mengisi materi dan membuat pelatihan di dalam kepemudaan.⁷⁰

Dalam hal ini Disparpora melakukan pembinaan dengan mengisi materi, membuat pelatihan, serta mengembangkan bakat melalui bujang gadis Muaro Jambi, ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap pemuda yang hanya terpaku pada dua hal tersebut, seharusnya disparpora melakukan kegiatan secara berkelanjutan agar pemuda dapat benar-benar mengembangkan bakatnya dan berperan aktif sesuai dengan amanat Negara dalam UU Nomor 40 tahun 2009 pasal 45 ayat 1 dan 2 yakni:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan, (2) satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya”.⁷¹

Artinya Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan dalam hal ini masalah organisasi kepemudaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi membuat struktur organisasi, yakni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasi-organisasi kepemudaan.

Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang kemudian disingkat dengan

⁷⁰ Wawancara dengan Hatimah SE Kabag Umum dan Keuangan Disparpora, 23 Agustus 2019

⁷¹ UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Dispaspora. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga membawahi 4 bidang, yakni bidang pengembangan usaha dan pemasaran kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata, Bidang Kepemudaan, dan Bidang Keolahragaan. Bidang Kepemudaan kemudian bertanggung jawab dalam organisasi kepemudaan.⁷²

B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Muaro Jambi

Adapun faktor penghambat dalam pengembangan dan pembinaan pemuda di kabupaten muaro Jambi terkait dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang ingin diciptakannya masih kurang strategis, sehingga apa yang diharapkan dalam pengembangan dan pembinaan hanya bersifat retorik belaka yang amat jauh dari harapan bangsa. Sebagaimana wawancara bersa DISPARPORA sebagai berikut :

Masih terjadi simpang siur tentang peraturan daerah apakah yang membina dan mengembangkan pemerintah itu dari instansi pemerintahan lain, seterusnya kekurangan anggaran, dalam membina ini yang diragukan apakah dari KESBANGPOL atau DISPORAG atau DISPARPORA itu sendiri,, dalam pembinaan pemuda masih kurang karena kekurangan anggaran dana, lalu kekurangan pengetahuan dari Pemuda karena ada bantuan untuk dikucurkan kebengkel dari usaha pemuda tidak bisa karena masih kurang administratif yang kekurangan badan hukum, dan belum mempunyai izin dalam usahanya.⁷³

Keterangan diatas menggambarkan bahwa peran disparpora terkendala oleh instansi lain, anggaran dana, dan pemahaman pemuda yang belum memiliki izin. Dalam permasalahan tersebut dalam perencanaan dan pematangan konsep pemerintahan masih simpang siur, artinya pemerintahan DISPARPORA belum paham tentang tugas dan fungsinya, ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia

⁷² Peraturan Bupati No 32 tahun 2019

⁷³ Wawancara Bersama Herman Susilo, SE Kabid Pemuda dan Olahraga, 20 september

dalam instansi tersebut belum memenuhi standar dalam menjalankan roda birokrasi.

Dalam pengembangan pemerintahan Muaro Jambi mesti memikirkan manajemen baik itu planing, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi. Ditahap perencanaan DISPARPORA sudah mengalami kebingungan tentang kinerja yang akan dilakukan ini menunjukkan ketidak matangan dalam penyusunan perencanaan sehingga menyebabkan kekacauan, baik itu dalam organizing yang masih tumpang tindih terhadap kinerja, kekurangan dana yang menyebabkan disfungsi dalam menjalankan roda pemerintahan, melahirkan sebuah tindakan (implementasi) yang hanya sekedarnya saja yaitu berupa mengisi materi di acara pelatihan dan mengadakan kegiatan Bujang Gadis Muaro Jambi.

C. Upaya Pemerintahan Dalam Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Muaro Jambi.

Adapun Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan pemuda Kabupaten Muaro Jambi. Wahyu Aditya dalam wawancara mengatakan :

Mahasiswa berfungsi sebagai control bagi pemerintahan selain itu pemuda juga sebagai harapan bagi masyarakat dalam menciptakan perubahan yang baik dalam masyarakat, untuk itu pemerintah harus memfasilitasi para pemuda ini, Sejauh ini yang difasilitasi hanya sesuatu yang bersifat ceramah, seperti mengisi materi pada setiap kegiatan.⁷⁴

Pemerintahan dalam hal ini disparpora memberikan suatu pembinaan yang sifat nya sumbangan pemikiran keilmuan, yang dapat dapat menambah wawasan

⁷⁴ Wawancara Bersama Wahyu Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi

sebagai pembentukan karakter anak bangsa (carakter building) untuk menghadapi kematangan dalam kebangsaan kita secara pemikiran nantinya. Selain keilmuan dalam hasil wawancara bersama Pemuda Pancasila Muaro Jambi dia mengatakan :

Pemerintah Muaro Jambi dalam hal ini disparpora hanya memberikan sesuatu pendampingan pengisian materi, lalu adanya bujang gadi Muaro Jambi sebagai penempah kreativitas pemuda.⁷⁵

Disarpora juga memberikan suatu wadah sebagai penempahan potensi diri dalam pengembangan organisasi pemuda melalui bujang gadis Muaro Jambi, dengan membuat perlombaan agar bakat pemuda dapat tersalurkan dan berkembang perlombaan tersebut mengenai beberapa aspek bagaimana bersosial, memperkenalkan pariwisata dan lain sebagainya, ini bertujuan supaya mampu memberi retorika yang menarik terhadap wilayah tersebut. DISPARPORA muaro Jambi membina dan mengembangkan pemuda yaitu berupa : Intelektual Pemuda (Hard Skill) dan Pengembangan Potensi Pemuda (Soft Skill).

Dalam pembinaan dan pengembangan hard skill, dan soft skill belum maksimal dan masih banyak sekali kekurangan, untuk mencapai regenerasi yang baik karena ada faktor yang tidak mendukung atau menghambat peran pemerintahan Muaro Jambi atau pemerintah itu sendiri tidak sadar akan fungsi dan perannya itu sendiri.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Di Daerah Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten

⁷⁵ Wawancara bersama Dr Sudarmono Ketua Umum Pemuda Pancasila

Muaro Jambi. Dalam pembinaan organisasi kepemudaan di daerah yang menjadi bagian dari kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*). Dalam hal ini adalah analisi SWOT.⁷⁶ yaitu sebagai berikut :

1) Strengths (Kekuatan)

- a) DISPARPORA Kabupaten muaro jambi telah dipimpin oleh PNS dengan kualifikasi gelar sarjana dan magister yang diharapkan telah mumpuni dibidangnya.
- b) DISPARPORA Kabupaten muaro jambi merupakan instansi yang membina organisasi kepemudaan.

2) Opportunities (Peluang)

- a) Tingginya antusias dan kreativitas pemuda Kabupaten muaro jambi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di organisasi kepemudaan yang mereka ikuti
- b) Organisasi pemuda yang selalu didampingi DISPARPORA dalam mengisi kegiatan seperti seminar, pelatihan dalam hal ini DISPARPORA mengisi materi pada kegiatan tersebut.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten muaro jambi dalam pembinaan organisasi kepemudaan di daerah yang menjadi bagian dari kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).⁷⁷ yaitu sebagai berikut :

⁷⁶ Tri Yoga Pangestu1 Dkk, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Di Daerah*, Jurnal Hukum, Universitas Lampung 2015

⁷⁷ Tri Yoga Pangestu1 Dkk, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Di Daerah*, Jurnal Hukum, Universitas Lampung 2015

1) Weaknesses (Kelemahan)

- a) Prioritas program DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi yang lebih mengedepankan pada partisipasi kegiatan yang telah diprogramkan oleh Kemenpora ketimbang program pembinaan.
- b) Kurangnya alokasi pendanaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk DISPARPORA Kabupaten muaro jambi, sehingga pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan kurang dapat optimal dilaksanakan.

2) Threats (Ancaman)

- a) Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan.
- b) Oranisasi Kepemudaan belum terdaftat di KESBANGPOL
- c) Organisasi kepemudaan yang terdaftar tersebar di seluruh Kabupaten Muaro Jambi yang mana berpotensi untuk mendapat pengaruh paham-paham negatif dari luar.

Berdasarkan penjabaran kekuatan (strength), peluang (opportunities), kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) maka formulasi strategis melalui matriks TOWS.⁷⁸ sebagai berikut :

1. S-O Strategies : DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi perlu melakukan konsolidasi dengan Badan Kesbangpol Muaro Jambi terkait pendataan organisasi kepemudaan dan memetakan kebutuhan para anggota organisasi kepemudaan, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat tepat sasaran

⁷⁸ Tri Yoga Pangestu1 Dkk, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Di Daerah*, Jurnal Hukum, Universitas Lampung 2015

2. W-O Strategies : DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi harus membuat program kerja yang bukan hanya mencakup partisipasi kegiatan namun juga program pembinaan, pengembangan kepemudaan dan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh masing masing organisasi kepemudaan.
3. S-T Strategies : Pimpinan DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi perlu membentuk koordinator wilayah dari Bidang Kepemudaan DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi dengan tugas yang lebih rinci dan mengetahui program kerjanya. Hal ini dilakukan agar pembinaan kepada organisasi kepemudaan dapat dilakukan secara merata dan dirasakan oleh seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi sehingga peningkatan kualitas anggota organisasi kepemudaan dapat diwujudkan.
4. W-T Strategies : Pemaksimalan kegiatan dengan skala prioritas sehingga dengan pendanaan yang minim DISPARPORA Kabupaten muaro jambi tetap dapat melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.

Pemuda adalah bagian dari masyarakat yang memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perubahan kearah yang lebih baik, karena keberanian yang tinggi dan idealisme yang mengebu-gebu. Dalam sejarah pemuda memberikan suatu peran partisipasi yang sifatnya sebagai control terhadap pemerintahan. Ketika terjadinya kejanggalan-kejanggalan atau kesewenangan dari penguasa, maka hanya ada satu kata lawan. Begitulah penggambaran idealisme pemuda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maka dari itu penting untuk memahami bahwa pemuda hari ini harus menyentuh ranah sosial, agar keberanian yang tinggi itu dapat bernilai positif.

Elemen sosial, sebagaimana yang disebutkan oleh Francis Fuuyama (1995) cukup banyak yang secara keseluruhan yang disebut social virtues. Misalnya saja berkata benar, kejujuran, dan tanggung jawab. Tetapi, yang paling inti pada modal sosial ini adalah kepercayaan (trust), yaitu nilai yang menjadi perekat antar orang sehingga bisa berkembang menjadi kerja sama, pembentukan jaringan, organisasi, dan komunitas yang kuat. Karena itu, yang penting dikaji lebih khusus adalah nilai sentralnya yaitu trust. Francis Fukuyama sempat memberikan pertanyaan teoritis “apa jadinya dunia tanpa kepercayaan” ? mereka yang membuat perjanjian akan sangat disibukan dnegan bagaimana meneliti agar dalam setiap perjanjian tidak akan terjadi penipuan. Kerja sama baik dalam bisnis maupun asosiasi juga tidak akan pernah dapat diwujudkan tanpa kepercayaan.⁷⁹

Bila kebanyakan orang dalam suatu masyarakat dapat dipercaya, masyarakat itu mencapai apa yang oleh Francis Fukuyama disebut higt trust society, masyarakat dengan derajat kepercayaan yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika pada suatu masyarakat kebanyakan orang yang tidak dapat dipercaya, masyarakat itu disebut low trust society, atau masyarakat itu mengalami ketekoran atau deficit (lack of trust) dalam kepercayaan satu sama lain (mutual trust). Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berpotensi untuk membentuk kelompok yang terorganisasi. Misalnya asosiasi, koperasi, birokrasi,

⁷⁹ Andi Sinulinga, *Berharap Pada Pemuda?*, (Jakarta : Suara Karya 2006), Hlm.154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau perusahaan berskala besar. Sedangkan masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah maka akan dapat menghambat proses dalam menata dan mengembangkan komunitas dan kelompok. 94-95 berharap pada pemuda.⁸⁰

Sejarah bukan sekedar merupakan rekonstruksi masa lalu sebagaimana dipahami oleh khalayak, sejarah itu berdimensi banyak, terkait pula dengan dimensi kekinian dan konteks masa depan. Sejarah merupakan sumber pencerahan. Kuntowijoyo (1999) mencatat sebelas fungsi pendidikan : pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan, ilmu bantu, latar belakang, rujukan dan bukti. Sementara itu sosiolog Ali Syariati memakai sejarah masa depan dalam sebuah tulisannya, menunjuk pada sebuah kondisi yang diidam idamkan di masa depan. Sejarah masa depan harus dipersiapkan mulai sekarang. Harus ada rekayasa sejarah, agar dimasa depan kondisinya menjadi semakin baik, dari pada masa lalu dan masa kini, amat menentukan apa yang terjadi di masa depan.

Generasi muda selalu memiliki keterpanggilan sejarah dalam setiap kurun waktu sejarahnya. Idealisme yang mereka memiliki merupakan filter dan pisau bedah yang tajam, tatkala dihadapkan pada realita sejarah yang janggal dan bertentangan dengan apa yang seharusnya. Idealisme memang merupakan akumulasi dari pergumulan rasionalita-objektif dan keberpihakan nurani kemanusiaan dan kebenaran. Idealisme menempatkan nilai-nilai dasar kebenaran dan kemanusiaan tersebut secara konsisten. Kita benar-benar berharap pada tumbuhnya generasi muda sebagai generasi baru yang tumbuh rasa

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 154-155

keterpanggilannya atas masa depan sejarah. Bukan generasi muda yang berpangku tangan, atau tidak menghargai proses dan tidak mau belajar.⁸¹

Pada era pasca-kemerdekaan, tatkala generasi baru Indonesia diberikan kesempatan untuk mengelola sendiri bangsanya, maka pelbagai tantangan tidak otomatis menyusut. Apabila kita tengok kembali sejarah, maka kita akan dihadapkan pada banyak catatan yang membuat bangsa Indonesia mengalami kemunduran-kemunduran. Catatan-catatan tersebut membentang mulai dari mengerucutnya konflik ideologis, pemberontakan atau separatisme, perilaku negara yang represif, konflik sosial bersifat vertikal dan horizontal dalam masyarakat plural, terorisme, tingginya angka korupsi, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. apabila kita identifikasikan kembali apa saja permasalahan bangsa yang membentang didepan mata, maka niscaya kita tidak akan kesulitan mendaftar permasalahan-permasalahan tersebut secara rinci. Hampir semua bidang, dengan mudah permasalahan-permasalahan tersebut kita catat, dan lantas kita tentukan mana saja orioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Kita paham bahwa betapa kompleksnya permasalahan bangsa Indonesia di era reformasi saat ini.

Ditengah situasi bangsa yang ada saat ini, seharusnya generasi muda sebagai generasi baru bangsa terpanggil “menyingsingkan lengan baju”, bahu-membahu bersama yang lain tampil memberikan kontribusi positif bagi upaya penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. Upaya-upaya yang dilakukan tidak harus yang dianggap besar dan kelihatan, tetapi sudah seharusnya dimulai dari

⁸¹ Andi Sinulinga, *Berharap Pada Pemuda?*, (Jakarta : Suara Karya 2006), Hlm.155-156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hal-hal yang kecil dan di lingkungannya masing-masing, sesuai dengan profesi dan kapasitas yang dimiliki. Kepeloporan perubahan sosial menuju kondisi masyarakat, bangsa dan negara yang lebih baik dan maju, harus dilakukan secara konsisten dan dimulai dari tempat masing-masing.

Masyarakat membutuhkan sebuah teladan yang baik (*uswatun khasanah*), dan dengan fungsi-fungsi kepeloporannya, generasi baru diharapkan mampu memberikan contoh (*tauladan*) yang konkrit, tidak sekedar mengajak, tapi membuktikannya dengan kerja keras dan konkrit. Tidak sekedar mengajak, tetapi membuktikannya dengan kerja keras yang konkrit, sehingga khalayak memandang generasi muda sebagai generasi baru sesungguhnya-sungguhnya telah melakukan.⁸²

Generasi muda di setiap kurun sejarahnya selalu dihadapkan dengan dua pilihan, ibarat pedang bermata dua. Satu sisi mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan konstruktif atau yang bersifat membangun. Sisi lain, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan desktruktif. Bahwa generasi pemuda hari ini harus berhasil memperkuat kembali karakter dan wataknya sebagai generasi muda Indonesia yang memiliki segenap idealisme-sebagaimana dicontohkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Spirit dan cita-cita generasi muda pada kurun waktu sejarahnya, sebagai garda depan perwujudan nasionalisme Indonesia, harus ditangkap erat dan dilestarikan, di tanamkan dalam jiwa pemuda Indonesia sepanjang masa.⁸³

⁸² *Ibid*, Hlm.156

⁸³ Andi Sinulinga, *Berharap Pada Pemuda?*, (Jakarta : Suara Karya 2006), Hlm.157



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk itu pemerintahan diwajibkan mengembangkan dan membina pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan mampu menciptakan perubahan kearah perbaikan dalam tatanan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara lebih khususnya dalam Kabupaten Muaro Jambi. Menurut Ketua Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia Muaro Jambi Mengatakan :

Pemerintah khususnya disarpora tidak hanya memperhatikan sesuat yang bersifat mengisi materi saja tapi pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana prasarana yang dibutuhkan pemuda, karena pemerintah itu adalah pelayan bagi rakyatnya.⁸⁴

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun karakter pemuda yaitu : Penguatan watak (character Building), Penguatan Nation Building, Modal Sosial. Pengembangan dan pembinaan organisasi pemudaan, bukan hanya sesuatu yang bersifat formal saja agar proses pemuda Muaro Jambi menjadi sesuatu yang dapat diharapkan di masa depan tetapi juga sarana prasarana, pembinaan secara berkelanjutan, pemerintah harus paham tugas dan fungsinya serta mempunyai tanggung jawab serta kejujuran dalam menjalankan roda pemerintahan.

⁸⁴ Wawancara bersama Okta Ferry Ketua KNPI Muaro Jambi



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di daerah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata belum sepenuhnya melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini didasarkan pada laporan kegiatan Bidang Kepemudaan DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi bahwa belum maksimal dalam pembinaan Organisasi Kepemudaan, yaitu pada organisasi kepemudaan IMMJ, Pemuda Pancasa Dan KNPI Muaro Jambi. Hanya bersifat mengisi materi dan pendampingan saja.
- 2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi adalah DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan kegiatan berupa pendampingan dan pemberian materi, serta mengadakan minat bakat bujang gadis Muaro Jambi. Namun dalam melakukan pembinaan dan pengembangan masih belum maksimal. Faktor penghambat : Pemerintah Tidak Mengetahui Fungsi dan Tanggung Jawabnya, Masih Dibatasi Dengan Aturan Dan Kebijakan Instansi Lain, serta Kekurangan Anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, selanjutnya penulis mengajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi harus menyusun program kerja terkait pembinaan organisasi kepemudaan dan mengolah anggaran yang minim agar mampu digunakan untuk melaksanakan seluruh program-program pembinaan dan partisipasi kepemudaan dengan sistem prioritas.
2. Sebaiknya Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Membina dan mengembangkan SDM Birokrasi terhadap Disparpora, agar paham fungsi dan tanggung jawabnya.
3. Disparpora melakukan melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam menjalankan program kerjanya, apabila masih tumpang tindih dalam menjalankan program kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daftar Pustaka

A. Reference

Alqur'an (Jakarta : Thaha Putra 1971)

Andi Sinulinga, *Berharap Pada Pemuda?*, (Jakarta : Suara Karya 2006)

Budhy Munawar-Rachman, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Cet- 1 (Jakarta Selatan : Nurcholish Madjid Society (Ncms)).

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta:Premanada Media Group, 2013).

Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.Ke-5, (Bandung:Alfabeta,2013).

Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994).

Suyanto, *Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda* , E-Journal Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Uwgm Samarinda Vol.7 No.1

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Muhadam Lobollo, *Memahami Pemerintahan* Cet -7 (Jakarta : Raja Grapindo).

Wayan Gede Supartha, Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi Teori, Kasus, Dan Aplikasi Penelitian*, Cet 1 (Denpasar : Setia Bhakti).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

- L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002).
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syari'ah Press, 2004).
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali,1992).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Rianto Adi,*Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*,(Jakarta: Granit. 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis "Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitati, R&D*, (Bandung:Alfabeta,2013).

B. Undang Undang

UU Nomor 40 Tahun 2009

C. Lain Lainnya

Suyanto Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, UWGM Samarinda, dengan judul *Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda*, Juni 2018

Jurnal Elly Kumari Tjahya Putri, *Pengembangan Model Pemberdayaan Karang Taruna Terpadu Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Volume 12 Nomor 1, Juni 2013.

Wawancara dengan DISPARPORA, 23 Agustus 2019

Wawancara dengan sekretaris IMMJ Muaro Jambi

Wawancara dengan Ketua KNPI Muaro Jambi

Lampiran 1.

NAMA – NAMA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. INDRA GUNAWAN, MH	Kepala DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi
2	HATIMAH, SE	KASUBAG Umum dan Keuangan DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi
3	HERMAN SUSILO, SE	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga DISPARPORA Kabupaten Muaro Jambi
4	DR. SUDARMONO	Ketua Umum SAPMA-PP Kabupaten Muaro Jambi
5	OKTA FERRY	Ketua Umum KNPI Kabupaten Muaro Jambi
6	WAHYU ADITYA	Sekretaris Jendral Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 2.

RIWAYAT HIDUP




M. GHAZALI AKBAR lahir di Jambi pada tanggal 19 Juli 1995, putra dari pasangan bapak Usman (Alm) dan Ibu Yuliana. Dan sekarang menjadi anak pertama dari Bapak Mangun Muhir, SE dan Ibuk Yuliana. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan formal di SD 01 Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan lulus tahun 2007, melanjutkan pendidikan di MTSN Tumbu'an Kecamatan Lubuk Sandi Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MAS Al-Hidayah Sebapo dan lulus tahun 2013. Di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan (Program Strata 1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Sampai dengan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (Program Strata 1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 3.

 <p>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p><small>Jl. Jambi Ma. Bulian KM 16 Sei Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp/Fax: 0741 583151 584118. Web: https://uinjambi.ac.id/, email: mail@uinjambi.ac.id</small></p>	Kode Dokumen	Un.15/B.II/AK/27
	Kode Formulir	FM/AK/27/02
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	No Revisi	00
	Halaman	1 dari 1

Jambi, 4 Oktober 2019

Nomor : B-3393/D.II.1/PP.009/10/2019

Lampiran -

Perihal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Muaro Jambi

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

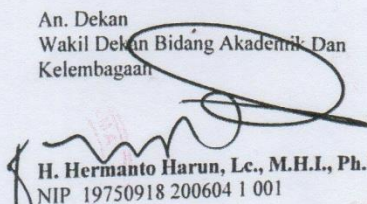
Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama	M. Ghazali Akbar
NIM	SIP 130064
Semester/Jurusan	XIII (Tiga Belas) / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik	2019/2020
Judul Skripsi	" Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Muaro Jambi "
Lokasi Penelitian	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi
Waktu Penelitian	4 Oktober 2019 – 4 Januari 2020

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



H. Hermanto Harun, Lc., M.H.L., Ph.D
NIP 19750918 200604 1 001

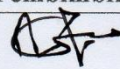
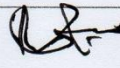
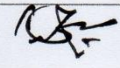
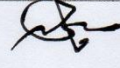

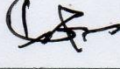
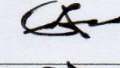
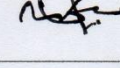
Tembusan

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

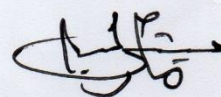
Lampiran 4.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama M. Ghazali Akbar
 NIM SIP 130064
 Pembimbing I Siti Marlina, S.Ag., MHI
 Judul Skripsi Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.
 Jurusan/Program Studi Ilmu Pemerintahan

No.	Tanggal	Konsultasi Ke-	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1		I	Penyserahan surat Panjungan Dosen Pembimbing	
2		II	Perbaikan proposal	
3		III	Tanda Tangan Izin Seminar	
4		IV	Perbaikan proposal	
5		V	ACC Pengesahan judul dan izin riset	
6		VI	Perbaikan skripsi	
7		VII	Perbaikan skripsi	
8	15-10-2019	VIII	ACC skripsi utk d. yg.	
9				
10				

Jambi, Oktober 2019
 Pembimbing I






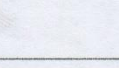


Siti Marlina, S.Ag., MHI
 NIP 19750221 200701 2 015

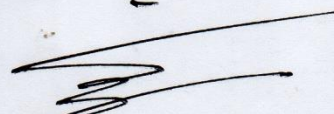
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asil:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama M. Ghazali Akbar
 NIM SIP 130064
 Pembimbing I Dr Dedek Kusnadi, S.Sos., MSI
 Judul Skripsi Peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Muaro Jambi.
 Jurusan/Program Studi Ilmu Pemerintahan

No.	Tanggal	Konsultasi Ke-	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1		I	Penyerahan surat Penunjukan Dosen Pembimbing	
2		II	Perbaikan Proposal	
3		III	Tanda Tangan Izin Seminar	
4		IV	Perbaikan proposal	
5		V	ACC pengesahan judul dan izin riset	
6		VI	Perbaikan skripsi	
7		VII	ACC skripsi untuk di uji	
8				
9				
10				

Jambi, OKTOBER 2019
 Pembimbing II


Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., MSI
 NIP 19811107 201101 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DOKUMENTASI



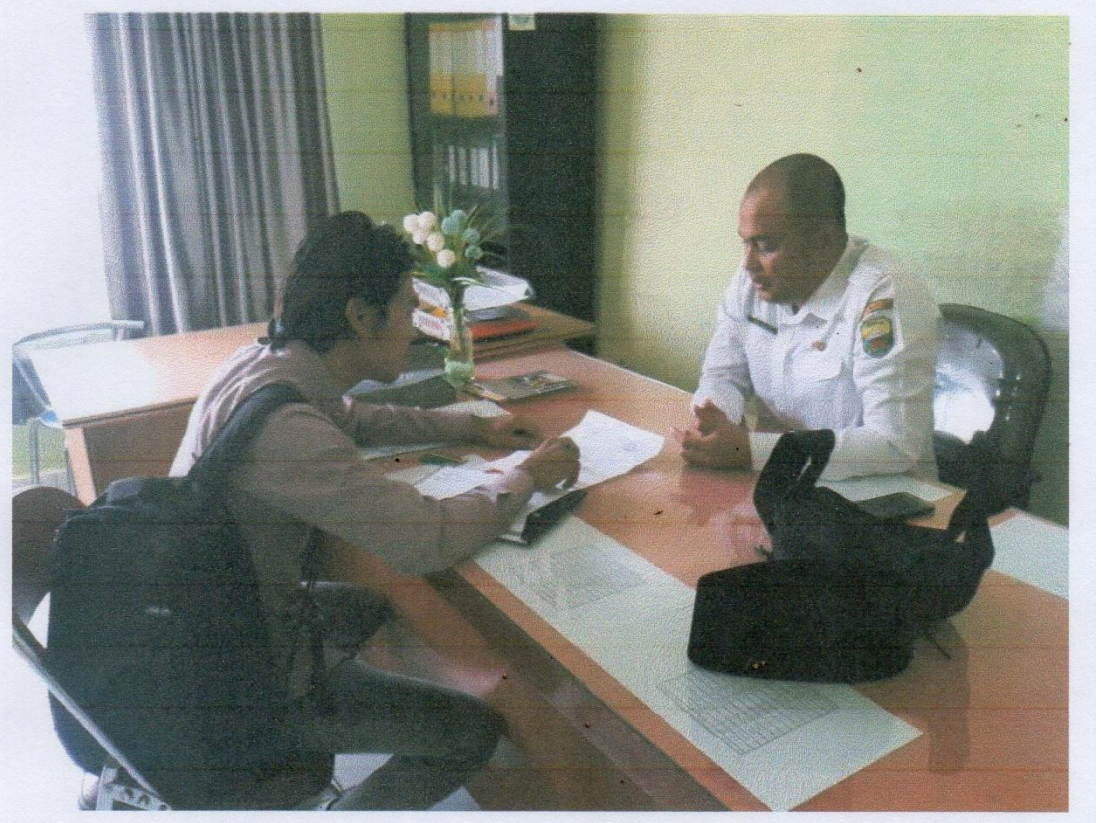
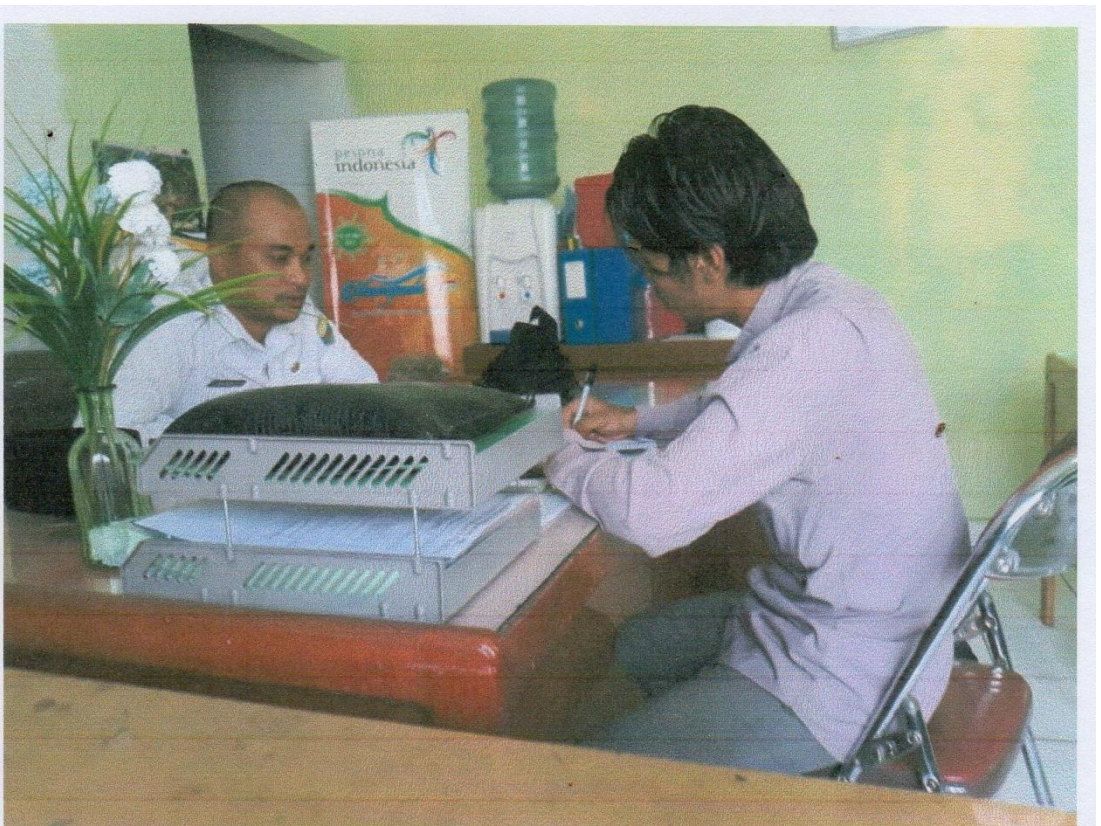
Lampiran 4.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi